

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chorus, R. (2024). *Untuk Hukum dan Keadilan Paul Scholten (1875 - 1946)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada. Jakarta.
- Efendi, A., Susant, D. O., & Sudarsono. (2025). *Ilmu Hukum Positif*. Kencana. Jakarta.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada. Jakarta.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hariyanto, E. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Manan, B. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2016). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Nur, A., & Mappiasse, S. (2021). *Pembaruan Ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial Di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*. Kencana. Jakarta.
- Rondonuwu. (2021). *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Saragih, B. R. (2006). *Politik Hukum*. CV Utama. Jakarta.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (S. R. Sjahdeni, Ed.). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Subianto. (2025). *Rekonstruksi Peradilan in Absentia: Solusi Atas Kekosongan Hukum di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Surnarmi. (2017). *Hukum Kepailitan*. Kencana. Depok.
- Suryanto, R. A. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Widjaja, G. (2009). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Forum Sahabat. Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

- Aditya, T. A. C. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indoonesia*, 1(3), 1549–1558. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/33>
- Akbar, R. M., & Trihastuti, N. (2025). Analisis Pembatalan Homologasi dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(1), 648–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6664>
- Amar Karar, T., & Yunanto. (2024). Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis. *NOTARIUS*, 17(2), 1215–1231. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.43352>
- Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU. *Journal of Comprehensive Science*, 2(6), 1834–1845. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.406>
- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 2746–5047. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8179.547-555>
- Kansil, C., & William, L. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2096–2103. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5599>

- Mahmudah, S. (2023). Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan Article. *Pancasila Law Journal*, 1(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>
- Octavianus, S., & Dharmasetya, L. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Anugerah Surya Propertindo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Journal Humaniora : Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 157–167.
- Prananingtyas, P., & Harsono, I. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *NOTARIUS*, 12(2), 1067–1088.
- Rahman, D. S., Gultom, E., & Permana, S. (2025). Mekanisme dan Implikasi Hukum Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 86–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.670>
- Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.317>
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB.” *Jurnal Jatiswara*, 36(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Sitepu, Y. A. S. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 431–448.
- Sofia, A. N. (2020). Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 3(4), 1415–1430. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>
- Stanly, V., & Tanawijaya, H. (2022). Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 380–402. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/issue/view/530>

Tasya Izulkha, A., & Rizqy Syailendra, M. P. (2025). Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pada Kasus PKPU (Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Developmeny*, 7(2), 880–887. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>

INTERNET

Arini, C. S. (2024, October 29). Rincian Utang Bejibun Sritex ke 28 Bank Baca artikel detikfinance, “Rincian Utang Bejibun Sritex ke 28 Bank.” DetikFinance. <https://finance.detik.com/moneter/d-7611176/rincian-utang-bejibun-sritex-ke-28-bank>

Bahan Baku Sritex Hanya Cukup untuk 3 Minggu, Pekerja Makin Terancam. (2024, November 12). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241112191642-92-1165867/bahan-baku-sritex-hanya-cukup-untuk-3-minggu-pekerja-makin-terancam>

Ryanthie, S. (2024, December 24). 3.000 Buruh Sritex Tak Tahu sampai Kapan Dirumahkan, Serikat Pekerja: Lama-Lama Bisa PHK. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/3-000-buruh-sritex-tak-tahu-sampai-kapan-dirumahkan-serikat-pekerja-lama-lama-bisa-phk-1185483>

Ryanthie, S. (2025, January 9). Terancam PHK, 50 Ribu Pekerja Sritex Surati MA: Minta Eksekusi Pailit Ditunda. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/terancam-phk-50-ribu-pekerja-sritex-surati-ma-minta-eksekusi-pailit-ditunda-1191994>

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum *Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

PUTUSAN

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg

Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024